

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Luh Putu Diva Rara Andini

2215672017

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Luh Putu Diva Rara Andini

2215672017

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)

Oleh:

Ni Luh Putu Diva Rara Andini

2215672017

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP

NIP. 196509011990031001

Disahkan Oleh :

Jurusan Akuntansi :

Ketua



I Made Bagiada, SE., M. Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)

Oleh :

Ni Luh Putu Diva Rara Andini

NIM. 2215672017

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 5 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

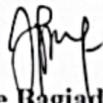
KETUA:



I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP

NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:



1. I Made Bagiada, SE., M. Si, Ak

NIP. 197512312005011003



2. I Made Dwi Wianjaya Putra, SST., BKP

NIP.

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Diva Rara Andini
NIM : 2215672017
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

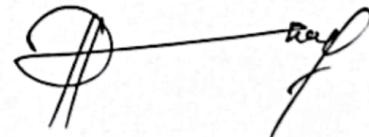
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang menyatakan



(Ni Luh Putu Diva Rara Andini)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Diva Rara Andini

NIM : 2215672017

Program Studi : DII Administrasi Perpajakan

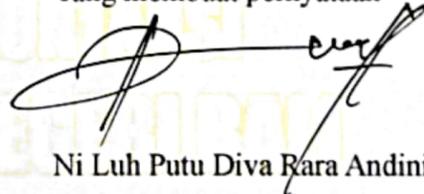
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ) adalah betul-betul karya saya sendiri dan bukan menjiplak hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Luh Putu Diva Rara Andini

NIM. 2215672017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M. Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan.
4. Bapak I Dewa Made Partika, S.e, M.Com., BKP selaku dosen pembimbing atas waktu, bimbingan dan saran yang diberikan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Bapak I Made Dwi Wianjaya Putra, SST., BKP selaku pimpinan dari DWP Consulting dan seluruh staff DWP Consulting, Ibu Novi, Mbok Rika, Mbok Ade, Kak Oka, Mbok Ayu, Mbok Amik, Mbok Masning, Mbok Yunda, Mbok Wini dan Mbok Esa yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan memberikan dukungan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir.
6. Anggota keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan semangat selama penyusunan Laporan Tugas Akhir.
7. Teman-teman yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saling memberikan semangat dan berbagi ilmu di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 5 Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA METODE NET DAN GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh 21 TERHADAP PPh BADAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)

Dalam laporan tugas akhir memuat suatu analisis mengenai perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode net dan gross up dan dampaknya terhadap PPh badan saat pelaporan SPT Tahunan Badan untuk perusahaan yang sudah menggunakan tarif umum. Studi ini didasari oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar gaji pegawai dan laporan keuangan PT. XYZ tahun 2022.

Hasil dari studi ini yaitu, perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up lebih efektif untuk digunakan dibandingkan dengan metode net. Hal ini karena penurunan atas PPh Badan yang dihasilkan dari perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PPh Pasal 21 yang dihasilkan.

Kata Kunci: Analisis, Perbandingan, PPh Pasal 21, Undang-Undang No 7 Tahun 2021, metode net, metode gross up, PPh Badan

COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS BETWEEN NET AND GROSS UP METHODS IN CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ART 21 AGAINST CORPORATE TAX (STUDY CASE AT PT. XYZ)

The Final Report contains contains a comparative analysis between net and gross up method in calculation of withholding tax art 21 and its impact on corporate income tax when reporting Annual Corporate Tax Returns for companies that already use general tax rate. This study is based on Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The data used in this research are employees salaries lists and financial reports of PT. XYZ in 2022.

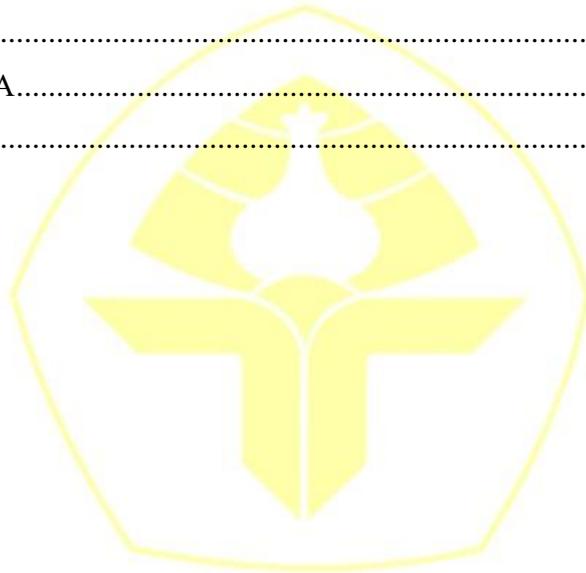
The final results of this study is, calculation of withholding tax art 21 with gross up method is more effective compared to the net method. It is because, the reduction of corporate income tax with gross up method in calculation on withholding tax art 21 is more than the increase of the withholding tax art 21.

Keywords: Analysis, Comparative, Withholding Tax Article 21, Law No. 7 Of 2021, Net Method, Gross Up Method, Corporate Income Tax

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK	v
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	6
2.3 Kegiatan Perusahaan	9
2.4 Lokasi Perusahaan.....	9
BAB III PERMASALAHAN	10
3.1 Permasalahan.....	10
3.2 Landasan Teori	11
3.2.1 Pengertian Pajak	11
3.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan	12
3.2.3 Pengertian PPh Pasal 21	12
3.2.4 Subjek PPh Pasal 21	13
3.2.5 Objek PPh Pasal 21	14
3.2.6 Tarif PPh Pasal 21	15
3.2.7 PTKP.....	16
3.2.8 Penambah dan Pengurang Penghasilan Bruto	18
3.2.9 Metode Perhitungan PPh Pasal 21	18

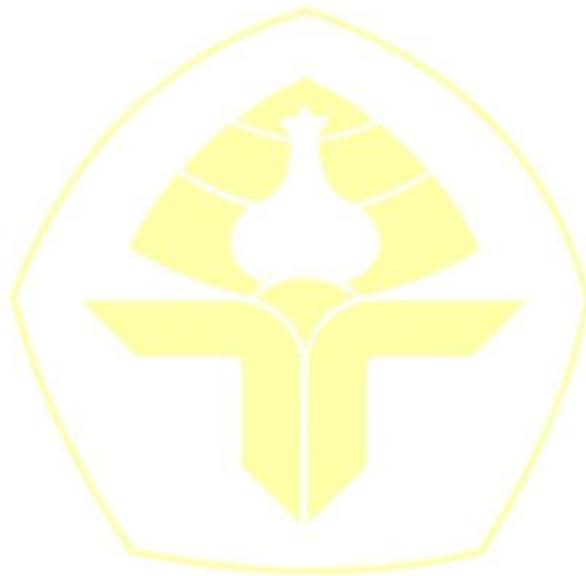
3.2.10	Pengertian Rekonsiliasi Fiskal.....	19
3.2.11	Jenis Rekonsiliasi Fiskal.....	20
3.2.12	Biaya yang Dapat Dikurangkan.....	20
3.2.13	Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan.....	22
BAB IV PEMBAHASAN.....		25
4.1	Perbandingan Metode Net dan Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 PT. XYZ	25
4.2	Perbandingan Metode Net dan Gross Up dalam rekonsiliasi fiskal PT. XYZ. 27	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		31
5.1	Kesimpulan	31
5.2	Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....		33
LAMPIRAN.....		35



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

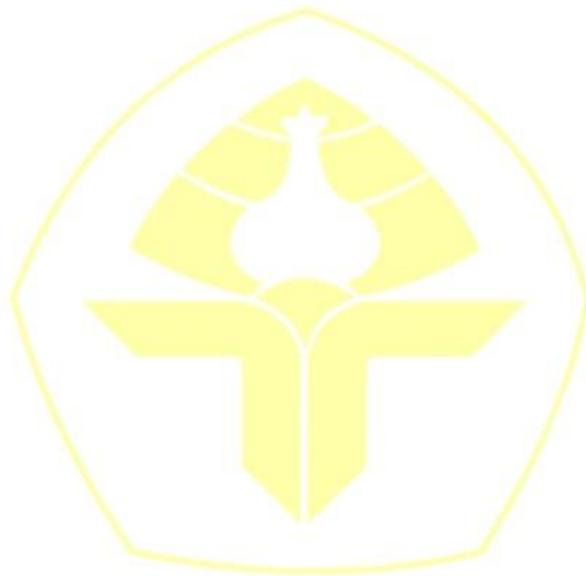
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perusahaan	6
Gambar 3. 1 Tahapan Penyelesaian Permasalahan	11



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif PPh Pasal 21	15
Tabel 3. 2 Tabel besaran PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi	16
Tabel 3. 3 Keterangan Status PTKP.....	17
Tabel 3. 4 Rician Besaran PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi.....	17



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia terdapat banyak jenis pajak yang pada hakikatnya merupakan kewajiban dan hak hidup sebagai warga negara Indonesia. Jenis pajak itu seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak penghasilan berdasarkan besaran tarif dan pengenaan objek pajaknya. Adapun jenis-jenis pajak penghasilan antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 28, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Salah satu jenis pajak yang paling sering ditemui di suatu perusahaan yaitu PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang memiliki dampak langsung pada karyawan dan perusahaan, karena PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan orang pribadi baik penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam perhitungannya, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung besaran PPh Pasal 21, diantaranya metode gross, net dan gross up. Ketiga metode ini digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh setiap karyawan atau perusahaan.

Saat ini banyak perusahaan yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya masing-masing. Tetapi tidak banyak perusahaan yang menerapkan aturan-aturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan

efisiensi pembayaran pajaknya. Banyak aturan-aturan perpajakan yang akan menguntungkan apabila perusahaan menerapkan manajemen pajak atau *tax planning*. *Tax planning* dilakukan untuk mengelola aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Tax planning* dapat diterapkan pada semua jenis pajak, salah satunya yaitu PPh Pasal 21

Setiap perusahaan di Indonesia yang menggunakan tenaga orang lain pasti memiliki pengeluaran untuk gaji, selain itu, tak sedikit kemungkinan bahwa dalam satu perusahaan pasti ada pegawai yang perhitungannya akan menimbulkan pajak terutang. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan lebih efisien untuk finansial perusahaan karena saat ini masih banyak perusahaan yang belum memaksimalkan regulasi-regulasi perpajakan yang ada untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Penerapan 3 metode perhitungan PPh Pasal 21 akan memberikan dampak yang berbeda pada penghasilan bersih atau *take home pay* yang akan diterima oleh karyawan dan besaran PPh badan yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan.

Perbedaan besaran pajak terutang yang timbul akibat 3 metode perhitungan PPh 21 menjadi hal yang mendasari penulis dalam pemilihan judul tugas akhir ini. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai metode mana yang akan memberikan dampak yang lebih efisien untuk suatu perusahaan yang sudah menggunakan tarif umum dan melakukan rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses perbandingan atau penyesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan dengan aturan perpajakan. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal yaitu memastikan setiap informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dalam rekonsiliasi fiskal, terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi dengan peraturan pajak. Tidak semua pendapatan atau biaya yang diakui oleh standar akuntansi, bisa diakui oleh peraturan perpajakan. Begitupun dengan biaya pajak yang timbul dari perhitungan PPh 21, ketiga metode tersebut memiliki perbedaan dalam pengakuannya secara fiskal.

Berdasarkan latar belakang diatas, tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui metode yang lebih efektif dalam perhitungan PPh 21 apabila digunakan oleh perusahaan yang sudah menggunakan tarif umum agar pembayaran pajaknya jadi lebih efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan metode Gross Up dan Net dalam perhitungan PPh 21 pada PT. XYZ?
2. Bagaimana pengaruh metode Gross Up dan Net dalam perhitungan PPh 21 terhadap PPh Badan pada PT. XYZ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui perbandingan PPh Pasal 21 yang timbul dari metode Gross Up dan Net pada PT. XYZ
2. Mengetahui pengaruh metode Net dan Gross Up dalam perhitungan PPh 21 terhadap PPh Badan pada PT. XYZ

1.4 Manfaat

1.4.1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu mengenai topik yang dibahas pada laporan tugas akhir. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai topik yang dibahas. Selain itu, laporan tugas akhir ini juga menjadi sarana penulis untuk menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh selama menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.

1.4.2. Bagi Lembaga

Laporan tugas akhir merupakan evaluasi akhir yang mencerminkan sejauh mana penguasaan materi mahasiswa. Hal ini dapat menjadi evaluasi untuk lembaga pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Selain itu, laporan tugas akhir juga dapat membantu akreditasi dan evaluasi program studi karena tugas akhir mencerminkan sejauh mana program studi dapat memberikan pendidikan yang relevan.

1.4.3. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan laporan tugas akhir untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh perusahaan kedepannya.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dihasilkan dari penggunaan metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh pegawai memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dihasilkan dari metode Net. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengakuan atas penghasilan bruto pegawai dari kedua metode tersebut.
2. Pada perhitungan PPh Badan, PPh Badan terutang yang dihasilkan dari metode gross up lebih kecil dibandingkan dengan metode net. Hal ini disebabkan oleh besarnya perbedaan pengakuan biaya dari kedua metode tersebut. Nilai biaya yang dapat diakui sebagai pengurang pada metode gross up lebih besar dibandingkan metode net, sehingga nilai laba yang dihasilkan menurun dan memperkecil nilai PPh Badan yang terutang.
3. Penggunaan metode yang lebih efektif dari kedua metode tersebut untuk perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode gross up. Pada metode gross up, walaupun nilai PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan lebih tinggi dari metode net, penurunan atas PPh Badan yang dihasilkan dari perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PPh Pasal 21 yang harus dibayar.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan penulis untuk PT. XYZ sebagai objek dalam laporan tugas akhir ini yaitu, dari kedua metode yang sudah dibandingkan dalam tugas akhir ini yaitu metode net dan gross up, diharapkan PT. XYZ untuk tetap menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai. Karena metode gross up yang sudah digunakan oleh PT. XYZ dinilai lebih efektif dibandingkan dengan metode net.

Selain itu, pada akhir tahun 2023 tepatnya di bulan Desember, terdapat peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, disebutkan pada Pasal 6 Ayat 2 “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk penerimaan natura dan/atau kenikmatan.” Selain itu, pada Pasal 7 huruf b “imbalan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan” tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan mengenai natura yang termasuk objek pajak penghasilan dan tidak termasuk objek pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Implikasi dari perubahan aturan ini yaitu, apabila perusahaan menggunakan metode net, perusahaan harus melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2022 karena nilai PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk pemberian natura dan/atau kenikmatan. Pada PMK No. 66 Tahun 2023, Pasal 3, biaya tanggungan PPh Pasal 21 merupakan biaya yang bisa dibiayakan dan merupakan penambah penghasilan bruto pegawai.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Adhithia, B. (2023, Juni 7). *Manajer adalah: Pengertian, Fungsi, Tugas, Peran, Hingga Persyaratannya*. Retrieved Januari 1, 2024, from LinovHR: <https://www.linovhr.com>
- Ardianti, K. A. (2023, Maret). *Pengertian Pajak Penghasilan*. Retrieved Desember 18, 2023, from Pajakku: <https://www.pajakku.com>
- Cermati. (2023, Maret 3). *PPH Pasal 21: Apa itu & Cara Menghitungnya*. Retrieved Januari 2, 2024, from Cermati.com: <https://www.cermati.com>
- Hidayat, R. (2022, Juli 11). *Jobdesk Accounting Staff (Staff Akuntansi)*. Retrieved Januari 1, 2024, from Kita Punya: <https://www.kitapunya.net/>
- Hidayat, R. (2023, Mei 29). *Tugas Admin Gudang: Jobdesk, Kualifikasi dan Gajinya*. Retrieved Januari 1, 2024, from Kita Punya: <https://www.kitapunya.net>
- Karyawan. (2020, September 20). *Direktur : Pengertian, Fungsi, Tugas & Tanggung Jawab, Gaji*. Retrieved Januari 7, 2024, from Karyawan: <https://karyawan.co.id>
- Kurniawan, D. (2021). *ANALISIS PERBANDINGAN METODE PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. PACHIRA MOTOR*. Universitas, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Pontianak.
- Ortax. (2007, Juli 16). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Retrieved Januari 2, 2024, from Undang-undang Nomor : 28 TAHUN 2007: <https://datacenter.ortax.org/>
- Ortax. (2008, September 22). *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Retrieved Januari 12, 2024, from Undang-undang Nomor : 36 TAHUN 2008: <https://datacenter.ortax.org>
- Ortax. (2016, September 28). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Retrieved Januari 12, 2024, from Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 16/PJ/2016: <https://datacenter.ortax.org>
- Ortax. (2016, Juni 21). *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Retrieved Januari 13, 2024, from Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016: <https://datacenter.ortax.org/>

- Ortax. (2021, Oktober 29). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved Januari 12, 2024, from Undang-Undang Nomor: 7 TAHUN 2021: <https://datacenter.ortax.org>
- Ortax. (2023, Desember 29). *Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. Retrieved Januari 20, 2024, from Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168 Tahun 2023: <https://datacenter.ortax.org>
- Ortax. (2023, Juni 27). *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan*. Retrieved Januari 18, 2024, from Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66 Tahun 2023: <https://datacenter.ortax.org>
- Pangerapan, M. E. (2020). *ANALISIS PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, SERTA PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN LABA KENA PAJAK PADA PT DWI MATRA SAKTI*. Universitas Sam Ratulangi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manado.
- Qothrunnada, K. (2022, September 28). *11 Tugas Kasir dan Tanggung Jawabnya yang Wajib Dipenuhi*. Retrieved Januari 7, 2024, from Detik Finance: <https://finance.detik.com>
- Rizkawijaya, V. A. (2023). *Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Penggunaan Metode Net Dan Gross Up Pada KAP Jimmy Andrianus Malang*. Universitas Katolik Widya Karya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Malang.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Gaji Pegawai PT. XYZ Tahun 2022

No.	Nama Pegawai Tetap	Gaji Pokok	Tunjangan				Bonus/THR	Total Gaji dan Bonus/THR	Premi BPJS	Jamsostek				Gaji Bruto
			Transport	Uang Makan	Insentif	PPH 21				JKK	JKM	JHT		
												Dibayar Perusahaan	Dipotong ke Karyawan	
1	THIO	530.000.000	-	-	-	-	40.000.000	570.000.000	-	-	-	-	-	570.000.000
2	ASALIM	40.000.000	-	-	-	3.852.926	-	43.852.926	-	-	-	-	-	43.852.926
3	SUKARDI	205.000.000	500.000	2.440.000	29.584.500	15.776.865	15.000.000	268.301.365	-	115.200	144.000	2.736.000	-	271.296.565
4	KRISNA	106.000.000	50.000	2.420.000	-	2.828.772	8.000.000	119.298.772	1.776.768	115.200	144.000	2.736.000	-	124.070.740
5	JOSH	48.000.000	9.600.000	-	-	-	4.000.000	61.600.000	1.776.768	83.520	104.400	1.983.600	-	65.548.288
6	NUGRAHA	62.500.000	350.000	2.500.000	10.835.760	428.791	5.000.000	81.614.551	1.776.768	86.400	108.000	2.052.000	-	85.637.719
7	SUKARYA	40.100.000	50.000	2.320.000	-	-	3.300.000	45.770.000	1.776.768	86.400	108.000	2.052.000	-	49.793.168
8	RAHMAT ADI SAPUTRA	38.700.000	700.000	-	1.612.500	8.420	3.100.000	44.120.920	1.776.768	83.520	104.400	1.983.600	-	48.069.208
9	PEBRIANI	37.240.000	-	1.680.000	2.221.000	71.840	3.020.000	44.232.840	1.776.768	86.976	108.720	2.065.680	-	48.270.984
10	NOVITAYANTI	36.580.000	-	2.520.000	-	-	2.965.000	42.065.000	-	85.392	106.740	2.028.060	-	44.285.192
11	SARIATI	33.960.000	-	2.520.000	-	-	2.780.000	39.260.000	1.776.768	80.064	100.080	1.901.520	-	43.118.432
12	BUDAYANA	30.500.000	-	5.500.000	-	-	2.500.000	38.500.000	1.776.768	72.000	90.000	1.710.000	-	42.148.768
13	SUARTIKA	30.000.000	-	2.580.000	-	-	2.500.000	35.080.000	1.776.768	72.000	90.000	1.710.000	-	38.728.768
14	KRISNADI	32.400.000	-	2.520.000	1.878.100	-	2.700.000	39.498.100	-	72.000	90.000	1.710.000	-	41.370.100
15	KARTIKAWATI	30.000.000	50.000	2.460.000	-	-	2.500.000	35.010.000	1.776.768	72.000	90.000	1.710.000	-	38.658.768
16	SETYARI	35.800.000	-	2.540.000	-	-	2.900.000	41.240.000	1.776.768	83.520	104.400	1.983.600	-	45.188.288
17	MAHAYUNI	34.100.000	-	2.540.000	-	-	2.800.000	39.440.000	1.776.768	80.640	100.800	1.915.200	-	43.313.408
18	MUAUF	38.750.000	-	2.520.000	4.976.250	-	2.400.000	48.646.250	1.800.000	86.400	108.000	2.052.000	-	52.692.650
19	BUADIARTA	35.300.000	-	2.480.000	4.431.155	-	1.934.000	44.145.155	1.630.750	83.040	103.800	1.972.200	-	47.934.945
20	SEPTIANTARA	7.820.000	-	-	735.000	-	-	8.555.000	296.500	12.960	16.200	307.800	-	9.188.460
21	PRAMADHIPTA	29.600.000	-	520.000	2.974.870	-	1.850.000	34.944.870	-	-	-	-	-	34.944.870
22	FELIX	225.000.000	-	-	-	19.570.485	20.000.000	264.570.485	-	-	-	-	-	264.570.485
	Total	1.707.350.000	11.300.000	40.060.000	59.249.135	42.538.099	129.249.000	1.989.746.234	25.048.466	1.457.232	1.821.540	34.609.260	-	2.052.682.732

Lampiran 2: Laporan Laba Rugi PT. XYZ Tahun 2022

PT XYZ LAPORAN LABA RUGI 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2022	
Nama Akun	L/R Komersial
PENDAPATAN	
Penjualan Neto	120.436.581.654
Total Pendapatan	120.436.581.654
BEBAN POKOK PENDAPATAN	
Persediaan Awal	2.216.773.186
Pembelian	109.516.269.252
Barang Siap Dijual	111.733.042.438
Persediaan Akhir	2.522.781.594
Beban Pokok Pendapatan	109.210.260.844
LABA BRUTO	11.226.320.810
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
Biaya Alat Tulis Kantor	13.052.448
Biaya BBM & Parkir	98.426.318
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	2.465.128
Biaya Legal dan Profesional	62.224.942
Biaya Listrik, Air, Telepon & Internet	25.241.998
Biaya Keperluan Kantor	14.951.300
Biaya Kerohanian	29.896.800
Biaya Information Technology	42.000.000
Biaya Gaji dan Honorarium	1.994.770.797
Biaya Retribusi dan Perizinan	54.550.000
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	160.283.289
Biaya Reward Toko	305.569.127
Biaya Asuransi / JAMSOSTEK	67.798.751
Biaya Pajak	110.595.567
Biaya Konsumsi	8.253.500
Biaya Pemasaran	216.746.893
Biaya Sewa	1.997.771.316
Biaya Seragam	3.800.000
Biaya Upah Harian	1.245.077.200
Biaya Material Pemeliharaan	10.136.658
Biaya Operasional Lainnya	23.712.000
Total Beban Umum dan Administrasi	6.487.324.033
Laba/Rugi Operasional	4.738.996.777
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
PENDAPATAN NON OPERASI	
Pendapatan Bunga Bank	169.061.416
Laba Penjualan Aktiva Tetap	-
Pendapatan Lain-lain	434.197.052
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-
Sub Total Pendapatan Non Operasi	603.258.468
ADMINISTRASI BANK	
Biaya Administrasi Bank	82.873.393
Biaya Pajak Bunga Bank	33.813.428
Kerugian Penjualan Aktiva Tetap	81.681
Kerugian Penghapusan Piutang	-
Biaya Lain-lain	14.090.359
Sub Total Administrasi Bank	130.858.861
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAIN LAIN	472.399.607
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.211.396.384
Beban Pajak Penghasilan	1.197.395.540
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	4.014.000.844

Lampiran 3: Foto Kegiatan Selama Berkegiatan di Perusahaan Tempat Magang



Lampiran 3: Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN : 2023 / 2024

Nama Mahasiswa : Ni Luh Putu Diva Rara Andini
 NIM : 2215672017
 Judul : Analisis Perbandingan Efektivitas Antara Metode Net Dan Gross Up Dalam Perhitungan Pph 21 Terhadap Pph Badan (Studi Kasus Pada Pt. XYZ)
 Dosen Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E, M.Com.,BKP
 NIP Pembimbing : 196509011990031001

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19 Desember 2023	Pembahasan mengenai judul yang diangkat dalam tugas akhir dan aturan-aturan terkait judul	
2.	23 Desember 2023	Perbedaan perhitungan antara metode gross, net dan gross up dan pajak yang diizinkan.	
3.	27 Desember 2023	Pengertian judul untuk metode yang diangkat hanya 2 metode yaitu metode Net dan gross up	
4.	30 Desember 2023	Pembahasan landasan teori terkait judul yang diangkat dalam laporan tugas akhir	
5.	6 Januari 2024	Perbedaan rekonsiliasi fiskal antara metode net dan gross up, ada revisi koreksi biaya pajak	
6.	18 Januari 2024	Perbedaan perhitungan atau pengakuan biaya diantara metode Net dan gross up	
7.	24 Januari 2024	Peraturan terbaru pph 21 (PMK 68 tahun 2023) dan dampaknya terhadap metode tersebut	
8.	25 Januari 2024	Peraturan terbaru tentang ratur (PMK 66 tahun 2023) dan dampaknya terhadap 2 metode tersebut.	
9.			
10.			

**Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali

Mengetahui,
 Ketua Program Studi D2 AP

(_____)
 NIP. _____

Badung, 26 Januari 2024
 Dosen Pembimbing,


 I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP
 NIP. 196509011990031001